

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 16-31 MEI 2024

■ **Nusantara**
Hadapi Anomali Cuaca
LaNyalla: Perkuat Mitigasi Bencana

■ **Varia Senat**
Penghuni Bapas di Sulsel
Didominasi Kasus Narkoba

■ **Sekretariat Jenderal**
Gunakan Dana Hibah
DPD RI Bangun Kantor di Jatim

■ **Kuliner**
Empat Kuliner Terenak di Kaltara
The Four Most Delicious Foods in North Kalimantan



DPD RI

AWASI PELAKSANAAN

IBADAH HAJI 2024

SCAN ME!

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia

ISSN 2978-3118

ISSN 2987-3118



9

772987

311004



SENAT UTAMA

04



DPD RI

Awasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2024

Fasilitas Kesehatan Terpasang dengan Baik

Tantangan bagi Jemaah Indonesia

Cuaca Panas Ekstrem di Tanah Suci

NUSANTARA

09

Hadapi Anomali Cuaca

LaNyalla: Perkuat Mitigasi Bencana

Pasca Galodo di Sumbar

Sultan: Pulihkan Segera Akses Transportasi

Senator Emma Yohana Kirim Logistik

ke Daerah Bencana Galodo Sumbar

HIPMI Kutim Harus Berpikir Luas Bangun Usaha

Papua Darurat Kesehatan

Fadel Muhammad: Kemajuan Indonesia Ditentukan Daerah

VARIA SENAT

17

Penghuni Bapas di Sulsel

Didominasi Kasus Narkoba

UU Ciptaker Kerdilkan Daerah

Senator Merasa Heran:

Ada Daerah Kaya Tapi Rakyatnya Miskin

Cegah Kecurangan Pemilu

Perlu UU Anti Politik Uang

SEKRETARIAT JENDERAL

22



Gunakan Dana Hibah

DPD RI Bangun Kantor di Jatim

Sekjen DPD RI Lepas 96 PPPK Ikuti Diklat ke Rindam Jaya

Karo PHM Terima Delegasi DPRD Klaten

GALERI FOTO

27



GAGASAN

28

Pentingnya Pengawasan Aktif DPD RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

KULINER

30

Empat Kuliner Terenak di Kaltara

The Four Most Delicious Foods in North Kalimantan.





Perubahan Cuaca dan Peringatan DPD RI

Indonesia baru-baru ini menghadapi peningkatan cuaca ekstrem yang signifikan, menimbulkan kekhawatiran akan potensi bencana yang dapat menelan korban jiwa. Menanggapi hal ini, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat strategi mitigasi mereka. Ancaman langsung meliputi kekeringan dan hujan lebat, akibat dari peningkatan suhu global. Pemerintah daerah didorong untuk berkolaborasi erat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang keduanya diakui sebagai ahli dalam teknologi dan cuaca, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat.

Informasi prakiraan cuaca harus diintegrasikan ke dalam kebutuhan informasi harian masyarakat. Secara historis, pengabaian publik terhadap data tersebut telah meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir lahar dingin di Sumatera Barat dari puncak Merapi, yang baru-baru ini memuntahkan jutaan meter kubik material. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kampanye pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya informasi cuaca.

Langkah konkret termasuk peningkatan sistem peringatan dini dan pelatihan masyarakat untuk menghadapi situasi darurat. Penguatan kapasitas ini tidak hanya akan mengurangi risiko bencana, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga riset, Indonesia bertujuan untuk lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin meningkat. (* / Pemred).

Climate Change and Warning from DPD RI

Recently Indonesia is facing significantly extreme weather change, which invokes anxieties concerning life-threatening potential catastrophes. Commenting on this, the Chairman of DPD RI, AA LaNyalla Mattalitti, urges the provincial government to strengthen their mitigation strategy. Direct threats include drought and downpour, due to increasing global warming. The provincial government is urged to collaborate closely with Meteorological, Climatological and Geophysical Agency (BMKG) and National Research and Innovation Agency (BRIN) which both are acknowledged to be expert in both technology and climate, to improve the vigilance and awareness of the society.

Weather forecast information must be integrated into daily information need of the community. Historically, public ignorance toward such data had increased catastrophic risk such as cold lava eruption of Merapi in West Sumatera, which just recently erupted millions of cubic metre of lava material. Therefore, it is of primary importance for the government to intensify the campaign toward public education and awareness related to the significance of weather information.

Solid steps include enhancing the early warning system and public training to deal with emergency. Strengthening the capacity will not only reduce catastrophic risks but will also provide greater protection to the community. Through effective collaboration between the federal government and the provincial governments as well as with research institutions, Indonesia intends to get more prepared to face the ever-increasing climate change challenges. (* / Chief Editor)



DPD RI AWASI PELAKSANAAN IBADAH HAJI 2024



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat memimpin sidang paripurna bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memutuskan untuk melaksanakan pengawasan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Keputusan ini disetujui dalam Sidang Paripurna ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Selasa, 7 Mei 2024.



Ilustrasi haji. (Foto Wikipedia)

Saat memimpin sidang paripurna bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, menyatakan bahwa DPD RI, sebagai representasi dari masyarakat dan daerah, memiliki kepentingan langsung dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

DPD RI menugaskan Komite III yang merupakan salah satu alat kelengkapan DPD dengan lingkup tugas di bidang keagamaan, untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di Arab Saudi, selama fase persiapan maupun pelaksanaan.

Sebagai bagian dari tugas pengawasan ini, Komite III

DPD RI telah mengadakan beberapa rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Mereka juga mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan asosiasi penyelenggara haji dan umrah.

Pada tahun ini, Pemerintah Indonesia memberangkatkan sejumlah 241.000 jemaah haji, angka terbesar dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Tahun lalu, kuota hanya sebanyak 229.000 jemaah. Jumlah jemaah yang berangkat tahun ini terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler atau 92 persen dan 27.680 jemaah haji khusus atau 8 persen.

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Saiful Mujab, menginformasikan bahwa hingga tanggal 9 Mei 2024, visa sebanyak 213.320 jemaah haji reguler telah di-

terbitkan. “Visa untuk jemaah haji reguler sebenarnya sudah selesai 100 persen. Namun, ada jemaah yang membatalkan keberangkatan karena alasan kesehatan, meninggal, dan lainnya. Saat ini, Tim Dokumen Haji sedang memproses 241 visa sebagai pengganti,” jelasnya.

Jemaah haji Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci dalam 554 kelompok terbang (kloter), sesuai dengan kuota yang diberikan. Pemberangkatan kloter pertama dijadwalkan pada tanggal 12 Mei 2024 dari 14 embarkasi yang meliputi Aceh (BTJ), Kualanamu (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta-Pondok Gede (JPG), Jakarta-Bekasi (JKS), Kertajati (KJT), Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), dan Makassar (UPG). (*)

Fasilitas Kesehatan Terpasang dengan Baik



Rombongan Komite III DPD RI saat mengunjungi KKHI Madinah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dipimpin oleh Ketuaanya Hasan Basri, melakukan pengawasan atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M di Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi. Kunjungan pertama mereka adalah ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah pada Kamis, 9 Mei 2024.

Di KKHI Madinah, rombongan Komite III DPD RI didampingi oleh Kepala KKHI Madinah Karmijono, meninjau ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan ru-

ang rawat inap. Mereka ingin memastikan bahwa KKHI siap menerima pasien dari kalangan jemaah haji. Selain itu, mereka juga berdialog dengan petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) di Madinah.

“Setelah melakukan peninjauan dan mendengarkan beberapa penjelasan dari petugas KKHI Madinah, kami menilai bahwa semua fasilitas kesehatan untuk para jemaah haji telah terpasang dengan baik dan siap digunakan mulai 12 Mei,” ujar Hasan Basri. Ia menyebutkan bahwa fasilitas tersebut meliputi pelayanan

darurat 24 jam, perawatan inap, perawatan gigi, dan sanitasi.

Senator asal Kalimantan Utara ini, mengingatkan agar fasilitas yang masih belum lengkap segera dilengkapi. Ia juga meminta agar dokter spesialis yang bertugas adalah mereka yang memiliki pengalaman. “Melayani jemaah dengan tulus dan sepenuh hati akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta’ala,” imbuh Hasan Basri.

Tidak hanya fokus pada kesehatan, Komite III juga mengecek layanan katering



Rombongan Komite III DPD RI saat mengunjungi Daker Makkah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

untuk memastikan kecukupan gizi para jemaah selama mereka berada di Arab Saudi. Setelah melakukan uji coba makanan dan merasa puas dengan rasanya, mereka meminta kepada 21 jasa katering yang telah dikontrak untuk terus menjaga kualitas, rasa, dan kebersihan makanan.

Komite III Juga Kunjungi Daker Makkah

Dari Madinah, rombongan Komite III melanjutkan kunjungan ke Daerah Kerja (Daker) Makkah, di mana mereka disambut oleh Kepala Daker Makkah Khalilurrahman Mengingat peningkatan jumlah calon jemaah haji tahun ini, banyak aspek penting yang memerlukan pengawasan ekstra. “Salah satu isu penting yang kami bahas adalah tentang penyediaan makanan,

yang tahun ini diputuskan akan sepenuhnya diterima oleh calon jemaah haji,” ungkap Hasan Basri.

Selain nutrisi, akomodasi selama berada di Makkah juga menjadi fokus utama. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Komite III DPD RI mendesak peningkatan kualitas akomodasi, terutama di Arafah dan Mina. “Dengan jumlah jemaah yang terus bertambah sementara kapasitas tempat yang tidak berubah, kami harus memaksimalkan apa yang ada,” kata Hasan.

Di Makkah, akan tersedia 168 hotel dan 57 penyedia layanan katering, yang akan menyediakan makanan sebanyak enam kali untuk melayani calon jemaah haji. Pelayanan tambahan juga akan disediakan untuk lansia, dan tim kesehatan telah dikerah-

kan ke Makkah untuk memastikan semua kebutuhan medis terpenuhi.

Komite III juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik dalam transportasi dan aktivitas lainnya untuk menghindari antrian panjang dan kemacetan, khususnya di Arafah dan Mina, di mana kapasitas dan luas tempat tidak mengalami perubahan meskipun jumlah jemaah bertambah.

“Semoga dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI ini, jemaah kita dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan selamat, serta selalu diberikan kesehatan hingga kembali ke tanah air. Selamat datang di Makkah kepada semua calon jemaah haji Indonesia, semoga menjadi haji yang mabrur,” tutur Hasan Basri, mengakhiri dengan doa dan harapan. (*)



Tantangan bagi Jemaah Indonesia Cuaca Panas Ekstrem di Tanah Suci

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris, mengingatkan calon jemaah haji Indonesia untuk menjaga kondisi fisik agar tetap bugar. Kebugaran fisik merupakan faktor krusial dalam melakukan penyesuaian dengan kondisi cuaca di Arab Saudi. “Meskipun semua jemaah haji telah memenuhi istitha’ah kesehatan, kondisi fisik yang dinamis membutuhkan perhatian khusus, terutama menjelang hari keberangkatan,” ujar Fahira pada Selasa, 7 Mei 2024.

Fahira menekankan pentingnya menjaga kebugaran fisik dan kesiapan mental menjelang keberangkatan. Ia

menyarankan para jemaah untuk menghindari kegiatan fisik yang berlebihan, mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki dan senam yang tidak menyebabkan kelelahan, serta menghindari konsumsi makanan dan minuman manis serta asin secara berlebihan. “Pastikan untuk mendapatkan istirahat yang cukup agar fisik kuat dan dapat menjalani ibadah haji dengan sempurna,” imbuhnya.

Menyikapi cuaca panas ekstrem di Tanah Suci, terutama di Makkah, yang sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia, kebugaran fisik menjadi lebih penting. “Jemaah yang bugar sebelum keberangkatan akan lebih mampu mengatasi kelelahan dan menghindari sakit selama melaksanakan prosesi ibadah,” kata Fahira.

Untuk mengatasi tantangan cuaca ekstrem, Fahira menyarankan jemaah haji untuk memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin, terutama saat berada di penginapan. “Hindari aktivitas di luar rangkaian ibadah haji,

terutama di luar ruangan, akan membantu jemaah menghindari cuaca panas yang dapat menguras energi,” tuturnya.

Fahira juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan hidrasi harian dan menghindari dehidrasi. Selain itu, membawa payung dapat efektif melindungi dari *heat stroke* atau sengatan panas, membantu jemaah melancarkan prosesi ibadah haji.

“Meski jadwal aktivitas ibadah haji akan sangat padat, penting bagi para jemaah untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi dan vitamin terpenuhi, terutama dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayuran,” ungkap Fahira, mengingatkan pentingnya nutrisi bagi para jemaah.

Fahira Idris juga mengingatkan bahwa kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji adalah anugerah besar dalam hidup umat Islam. “Ini adalah panggilan dan pemberian kemampuan dari Allah SWT kepada mereka yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat kepada semua jemaah haji Indonesia yang sudah mulai diberangkatkan. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan menjadi haji mabrur,” tutup Fahira. (*)



Anggota DPD RI Fahira Idris
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Hadapi Anomali Cuaca

LaNyalla: Perkuat Mitigasi Bencana

Belakangan ini, Indonesia mengalami peningkatan cuaca ekstrem yang cukup signifikan. Untuk menghindari bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat dan mempersiapkan mitigasi terkait perubahan iklim tersebut.

“Saya mendorong agar segera dilakukan mitigasi kebencanaan dan langkah mitigasi lainnya untuk mencegah terjadinya bencana yang bisa memakan korban jiwa,” ujar LaNyalla saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Menurut LaNyalla, bentuk bencana akibat peningkatan suhu adalah kekeringan dan hujan ekstrem, yang perlu segera diantisipasi agar tidak meluas. Ia menyarankan pemerintah daerah agar intens berkomunikasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Alasan LaNyalla adalah karena BRIN dan BMKG adalah lembaga ahli dalam bidang teknologi dan cuaca. Sehingga, pemda dan masyarakat



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta, Senin (6/5/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dapat memiliki kesiapsiagaan dan kesadaran akan perkembangan cuaca terbaru. Dari situlah semua pihak diharapkan memiliki pemahaman tentang dampak terburuk dari perubahan iklim.

LaNyalla menyampaikan bahwa informasi prakiraan cuaca harus menjadi kebutuhan informasi sehari-hari, karena selama ini masyarakat masih mengabaikannya. “Sejauh ini memang masyarakat belum begitu peduli dengan informasi terkait cuaca. Makaanya pemerintah juga perlu menyosialisasikan pentingnya informasi prakiraan cuaca. Kemudian membekali masyarakat dengan kemampuan respons dan kemampuan untuk mengatasinya jika ada peringatan,” ungkap LaNyalla.

Kekhawatiran LaNyalla itu telah terbukti, ketika pada

Sabtu (11/5/2024) malam, banjir dan longsor, atau yang disebut galodo oleh masyarakat Sumatera Barat (Sumbar), melanda beberapa daerah di Ranah Minang. Berdasarkan data terakhir, jumlah korban meninggal dunia akibat galodo tercatat sebanyak 58 orang dan korban hilang 35 orang dalam pencarian. Selain itu, terdapat 1.543 kepala keluarga yang terdampak dan 33 orang mengalami luka-luka.

BRIN telah menemukan peningkatan signifikan cuaca ekstrem di Indonesia, berdasarkan kajian perubahan iklim (2021-2050) khusus wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI) menggunakan teknik *dynamic downscaling* resolusi tinggi. BRIN mencatat, sejak bulan September hingga saat ini, kenaikan suhu per bulan rata-rata mencapai 1,5 derajat Celsius. (*)



Kondisi jalan yang putus di sekitar Lembah Anai akibat diterjang galodo. Jalan ini menghubungkan Kota Padang – Bukittinggi dan Tanah Datar (Foto Antara)

Pasca Galodo di Sumbar

Sultan: Pulihkan Segera Akses Transportasi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, meminta pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat pemulihan akses transportasi darat bagi penanganan korban banjir lahar dingin dan tanah longsor (galodo) di beberapa kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar).

Sultan menyatakan bahwa saat ini enam kabupaten dan kota di Sumbar mengalami kelumpuhan akses transportasi darat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB), harus mengalihkan seluruh perhatian mereka secara serius kepada para korban di daerah yang terdampak bencana tersebut.

“Kami harap semua pihak terkait berupaya keras untuk memulihkan akses jalan yang menghubungkan semua daerah terdampak. Kami meminta pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan bahan pangan, pakaian, dan obat-obatan bagi para korban yang selamat,” ucap Sultan pada hari Selasa (14/5/2024).

Menurutnya, bencana alam yang terjadi di Sumbar cukup

kompleks dan jarang terjadi karena melibatkan beberapa jenis bencana alam sekaligus, yakni banjir lahar dingin dan tanah longsor. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk mengantisipasi bencana susulan yang berpotensi terjadi kembali. “Atas nama lembaga, kami menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban yang terkena dampak banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumbar. Kami harap pemerintah lebih tanggap dalam menangani situasi di sana secara intensif,” kata Sultan.

Kepala BNPB, Suharyanto,



Kondisi jalan yang putus di sekitar Lembah Anai akibat diterjang galodo. Jalan ini menghubungkan Kota Padang – Bukittinggi dan Tanah Datar (Foto Antara)

telah meninjau enam titik lokasi terdampak yaitu Bukik-batabuah Kabupaten Agam, Pandai Sikek, Lubuk Mata Kuciang, Lembah Anai, Simpang Manunggal, dan Jorong Panti Kabupaten Tanah Datar pada hari yang sama. Dia menargetkan proses penanganan darurat agar berjalan optimal dan cepat, sehingga lokasi terdampak dapat segera pulih dan kembali normal.

“Hari ini kami mengunjungi empat lokasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Kami juga melakukan pendataan kerusakan mulai dari rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum agar bisa segera ditindaklanjuti untuk diperbaiki dalam jangka pendek, menengah, dan panjang,” ungkap Suharyanto.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB pada hari Selasa (14/5/2024) pukul 18.35 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat 58 orang, sementara jumlah korban hilang bertambah dari 27 menjadi 35 orang dalam pencarian. Keluarga yang terdampak berjumlah 1.543 KK dan 33 orang mengalami luka-luka. Pusdalops dan BPBD masih melakukan pengkajian dan pemutakhiran data menyusul masih berlangsungnya proses pencarian dan evakuasi korban.

Untuk mengoptimalkan distribusi bantuan logistik ke enam daerah terdampak, BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) men-

dukung percepatan perbaikan sejumlah jalan nasional yang terputus dan jembatan yang rusak. Akses terputus dan jembatan yang rusak meliputi jalan akses Simpang di Kota Padangpanjang dan 19 unit jembatan yang terdampak.

Karena kondisi jalan yang rusak, distribusi bantuan logistik bagi masyarakat dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter BNPB, terutama di daerah Kabupaten Tanah Datar. “Hari ini, karena kondisi transportasi yang sulit dan ada enam kabupaten serta kota yang terdampak, kami memerlukan pembagian waktu yang tepat. Tadi kami melihat yang paling parah di Lembah Anai, yang masih terputus. (*)

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Layanan Publik di Bagian Humas dan Fasilitas Pengaduan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Pada tahun 2023 hasil SKM menunjukkan bahwa rata-rata nilai SKM mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebesar 84,34 menjadi 86,92 pada tahun 2023 dengan kategori BAIK.



HASIL SKM TERKAIT LAYANAN PENERIMAAN KUNJUNGAN/ DELEGASI TAHUN 2023

86,19

BAIK

HASIL SKM TERKAIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

87,64

BAIK



RATA-RATA NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023

86,92

BAIK



HIPMI Kutim Harus Berpikir Luas Bangun Usaha



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin pada acara pelantikan pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin, memberikan kuliah umum dalam acara pelantikan pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, untuk periode 2024-2027, di Hotel Victoria, Sangatta, Kutim, Sabtu (11/5/2024).

Mahyudin mengimbau para pengusaha muda yang hadir untuk berpikir luas dalam menciptakan peluang bisnis, khususnya di Kutim dan Kalimantan Timur (Kaltim). “Anak muda harus berpikir luas, jangan seperti katak di dalam tempurung. Terlebih lagi, HIPMI ini diisi oleh anak-anak muda yang seharusnya

berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan penghasilan pasif,” katanya.

Mahyudin memperingatkan HIPMI Kabupaten Kutim, sebagai organisasi pengusaha muda, agar tidak hanya berpikir sebagai kontraktor yang hanya mengadakan proyek pemerintah. Sebaliknya, mereka harus menjadi pengusaha yang membangun peluang usaha secara luas.

Lebih lanjut, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Kutim dan Kaltim memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk usaha. Untuk kebutuhan pangan seperti telur, beras, dan daging, Kaltim masih bergantung pada provinsi lain. Sebagai pengusaha lokal, seharusnya mereka bisa melihat peluang ini.

Dia berharap adanya kolabo-

rasi antara pemerintah dan HIPMI melalui program kredit murah bagi para pengusaha muda yang ingin memulai usaha. “Seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan kredit usaha kepada calon pengusaha lokal dengan bunga di bawah 5 persen atau lebih rendah dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional yang bunganya 6 persen. Namun, untuk menghindari kredit macet, diperlukan persyaratan tertentu serta pembinaan kepada para calon kreditur.

“Di sinilah peran anggota HIPMI sangat dibutuhkan untuk membina para pengusaha ini, agar mereka sukses membangun usahanya serta mampu mengembalikan modal kepada pemerintah,” pungkas Mahyudin, anggota DPD RI dari daerah Kalimantan Timur. (*)

Senator Emma Yohanna Kirim Logistik ke Daerah Bencana Galodo Sumbar

Anggota DPD RI, Emma Yohanna, menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir bandang dan galodo yang terjadi di Nagari Sungai Puar, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bencana ini telah menyebabkan kerusakan signifikan dan merenggut banyak korban.

Dalam keterangan yang disampaikan pada hari Kamis, Emma Yohanna mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan meliputi 48 botol minyak goreng 2 liter, 120 botol minyak goreng 1 liter, 48 kain sarung, 17 sajadah, 40 handuk, dan 10 mukena anak-anak. Selain itu, juga disalurkan 150 ember, 150 gayung, 150 sapu, empat dus biskuit, 55 botol minuman, 11 kotak nasi, 10 dus aqua, 10 pasang sepatu bot, dan beberapa pakaian layak pakai. Bantuan tersebut ditambah dengan sumbangan uang tunai sebesar Rp. 5 juta.

Bantuan diserahkan di dua lokasi posko yang terletak di Jorong Galuang dan Jorong Kapalo Koto. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Fiki Ananda, mantan wali nagari Sungai Puar, bersama tim dari Emma Yohanna.

Doly Sofyan, Wali Jorong Kapalo Koto, menyatakan rasa terima kasihnya kepada Emma Yohanna atas dukungan kepada masyarakat terdampak. “InsyaAllah bantuan tersebut



Salah satu kawasan terdampak galodo di Sungai Puar, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. (Foto Antara.Com)

akan disalurkan langsung kepada masyarakat,” ucapnya.

Fiki Ananda, yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Agam, menyebutkan bahwa tragedi ini telah mengakibatkan 13 orang meninggal, dengan delapan orang di Jorong Galaung dan lima orang di Jorong Kapalo Koto, serta satu orang yang masih belum ditemukan.

Tim SAR yang terdiri dari Basarnas, Polri, dan TNI sedang bekerja keras untuk menemukan korban yang belum ditemukan. Fiki mengungkapkan harapan agar semua korban dapat segera ditemukan.

Emma Yohanna berencana untuk men-

dirikan posko kesehatan di Nagari Sungai Puar. Posko ini akan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan menyediakan obat-obatan untuk membantu korban bencana.

(*)



Senator Emma Yohanna
(Foto Jurnal Sumbar)

Papua Darurat Kesehatan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Papua Barat Filep Wamafma, telah mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai kondisi sektor kesehatan di Papua, yang ia sebut sedang dalam fase darurat kesehatan. Hal ini disampaikan Filep dalam sebuah pertemuan di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa (14/5/2024).

Menurut Filep, Otonomi Khusus (Otsus) yang diperjuangkan sebelumnya untuk peningkatan kesehatan di Papua tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan. “Papua dalam darurat kesehatan. Ini benar-benar situasi darurat untuk kesehatan,” ujarnya dengan nada serius.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianalisis oleh Filep menunjukkan angka kematian ibu (AKI) yang tinggi di Papua, yakni 565 kematian per 100 ribu kelahiran hidup, dengan Papua Barat mengikuti di posisi kedua dengan 343 kematian. Selain itu, kedua provinsi ini juga mencatat angka kematian balita tertinggi di Indonesia, dengan Papua mencatat 40,97 per 1.000 kelahiran hidup dan Papua Barat 47,23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022.

Lebih lanjut, Filep juga menyoroti masalah stunting yang signifikan di kedua provinsi tersebut. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan, Papua berada di urutan ketiga dengan 34,6%, dan Papua Barat di urutan keenam dengan 30% kasus *stunting*.

Filep menekankan pentingnya pendampingan terhadap masyarakat Papua dalam gaya hidup sehat secara

berkelanjutan, bukan hanya sekedar pemberian stok obat. Ia juga menyoroti kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter dan dokter spesialis, yang menjadi hambatan dalam peningkatan kesehatan di daerah tersebut.

Salah satu isu kritis yang diangkat adalah kondisi fasilitas kesehatan di Papua, yang banyak di antaranya masih berstatus rumah sakit tipe pratama, yaitu di bawah standar tipe D, padahal seharusnya sudah mencapai tipe C di tingkat kabupaten. Filep mengkritik pengelolaan rumah sakit yang tidak profesional dan menuntut adanya evaluasi menyeluruh.

Filep mendesak pemerintah pusat dan daerah, serta provinsi dan kabupaten, untuk serius menangani masalah kesehatan di Papua dengan menggunakan dana Otsus kesehatan dan dana kesehatan dari DBH Migas secara optimal. Ia meminta agar isu kesehatan ini tidak lagi dibiarkan berlarut-larut dan mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif dan efektif. (*)



Anggota DPD RI Filep Wamafma
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Fadel Muhammad: Kemajuan Indonesia Ditentukan Daerah

Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fadel Muhammad, menegaskan bahwa masa depan kemajuan Indonesia akan ditentukan oleh daerah. Menurutnya, jika daerah maju, maka bangsa Indonesia pun akan mengalami kemajuan. Namun, jika daerah terus tertinggal, kemajuan Indonesia hanya akan menjadi impian.

“Sayangnya, potensi kemajuan daerah masih dihadapkan pada beberapa persoalan pelik, antara lain banyaknya aktor politik yang memainkan kekuasaan di daerah, sementara kemampuan sumber daya mereka belum cukup mumpuni. Banyak di antara mereka yang kaget dan demam panggung saat memegang kekuasaan di daerah. Akibatnya, mereka malah melakukan tindak pidana korupsi. Buktinya, banyak kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Fadel saat memberi kuliah umum di Lemhanas, Rabu (15/5/2024).

Persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah itu belum benar-benar bisa diatasi. Dana APBD maupun transfer pusat ke daerah yang nilainya



Fadel Muhammad menerima cendera mata dari Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Lemhannas Mayjen TNI Fulad. (Foto Istimewa)

sangat besar belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang sangat tinggi menunjukkan ada kesalahan dalam pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut pengamatan Fadel, manajemen pemerintahan daerah sudah ketinggalan zaman dan harusnya mengikuti perkembangan yang ada. Dibutuhkan *collaborative governance*, yang belum dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dalam sistem *collaborative governance*, pemda harus memiliki pola pikir bahwa

APBD merupakan modal yang berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Contohnya, di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 27% dan 20% masing-masing, jumlah orang miskin dan pengangguran masih tinggi.

“Inilah pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. Seharusnya, pemda memakai anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Misalnya di sektor perikanan dan pertanian,” kata anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Gorontalo itu. (*)

Penghuni Bapas di Sulsel Didominasi Kasus Narkoba

Dalam kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Balai Pemasayarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 11 Mei 2024, terungkap bahwa lembaga pemasayarakatan di Sulawesi Selatan, termasuk lapas dan bapas, mengalami masalah over kapasitas yang signifikan. Saat itu, terdapat 11 ribu warga binaan, sedangkan kapasitas total hanya 6.700 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar delapan ribu kasus terkait dengan narkoba, menandakan dominasi besar kasus narkoba di antara narapidana.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, dan dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Kepala Bapas Sopiana, pejabat dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan *stakeholders* terkait lainnya. Mereka membahas kondisi saat ini dan strategi penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh bapas dan lapas.

Dalam pertemuan itu, Sopiana menjelaskan bahwa hanya di Bapas Kelas I Makassar saja terdapat 4.713 orang dewasa dan 9 anak sebagai warga binaan, dengan jumlah Pembimbing Ke-



Komite I DPD RI saat mengunjungi Balai Pemasayarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

masyarakatan (PK) yang berjumlah 90 orang. Rasio saat ini antara PK dan warga binaan adalah 1 berbanding 52, menunjukkan beban kerja yang berat dan kekurangan sumber daya manusia. Sopiana juga menyoroti rencana untuk renovasi bangunan rutan lama di Jeneponto sebagai rutan baru, sebagai upaya mengatasi permasalahan kapasitas.

Senator asal Sulsel Ajieq Padindang, mengekspresikan kekhawatiran mendalam terkait dominasi kasus narkoba di lapas. "Kejahatan narkoba ini sangat berbahaya karena sudah bersifat lintas negara. Oleh karena itu penanganannya harus *extraordinary*," kata Ajieq.

Fachrul Razi mengungkapkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga pemasayarakatan saat ini sangat

krusial dan membutuhkan perhatian serius. Beliau menekankan pentingnya isu seperti *over* kapasitas, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan dari kekerasan, serta monitoring dan pengawasan terhadap warga binaan. DPD RI berkomitmen untuk mendorong dan memperjuangkan aspirasi yang muncul selama pertemuan demi memperkuat fungsi dan kondisi bapas di masa depan.

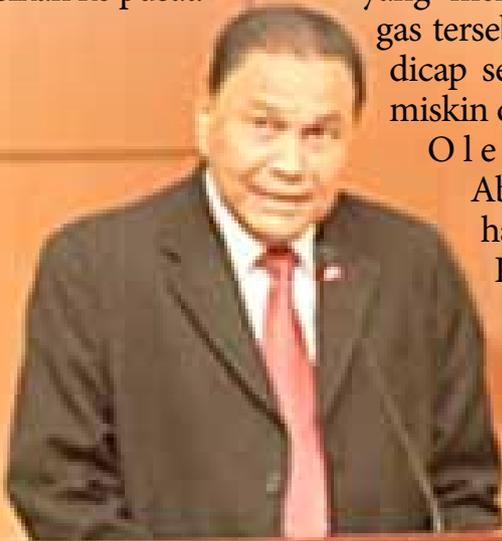
Pertemuan itu diikuti oleh Sylviana Murni merupakan Wakil Ketua Komite I DPD RI Misharti, dan berbagai anggota lain yang turut serta dalam kunjungan tersebut. Dengan berbagai masukan yang telah dikumpulkan, diharapkan akan ada perbaikan signifikan dalam sistem pemasayarakatan di Sulawesi Selatan. (*)



UU Ciptaker Kerdilkan Daerah

Sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diberlakukan, banyak kewenangan daerah dikerdilkan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) karena ditarik ke pusat. Bahkan, sampai urusan Nomor Induk Berusaha sudah diatur oleh pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdullah Puteh dalam laporannya dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Selasa (7/4/2024), menyebutkan bahwa kewenangan pengelolaan SDA di daerah disentralisasikan ke pusat.



“Sejumlah tokoh dan pemimpin di Aceh mengeluhkan adanya penarikan kewenangan dalam pengelolaan SDA oleh pemerintah pusat. Padahal dengan adanya kewenangan daerah dalam mengelola SDA tersebut, dapat digunakan sebagai modal pembangunan dalam menyejahterakan masyarakat,” kata anggota DPD RI dari daerah pemilihan Aceh itu.

Diungkapkan, enam bulan yang lalu Aceh dikejutkan dengan ditemukannya cadangan minyak dan gas yang besar. Namun ada kebijakan pemerintah pusat bahwa semua minyak dan gas itu dibawa ke Pulau Jawa. Semua kalangan dan tokoh di Aceh mempersoalkan masalah ini ke pemerintah pusat. Aceh yang memiliki minyak dan gas tersebut sekarang masih dicap sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

Oleh karena itu, Abdullah Puteh berharap agar DPD RI sebagai lembaga representasi masyarakat dan daerah dapat

mendorong agar pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan temuan minyak dan gas tersebut yang dapat digunakan dalam memajukan perekonomian Aceh.

“Saya mohon agar hal tersebut dapat dibantu, terutama Pimpinan DPD, agar pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Jika tidak, akan terulang temuan migas di Arun karena pemerintah pusat tidak hadir,” kata Abdullah Puteh.

Hal serupa juga dikeluhkan anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah (Kalteng) M Rakhman. Dia mengeluhkan minimnya kewenangan pemerintah daerah (pemda) dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja. Pasca UU tersebut diberlakukan, otonomi daerah tidak berjalan seperti yang dicita-citakan, justru sentralisasi kembali muncul. “Pemerintah daerah hanya merasa menjadi stempel saja, karena sampai urusan Nomor Induk Berusaha sudah diatur oleh pemerintah pusat,” tegas Rakhman. (*)

Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Senator Merasa Heran: Ada Daerah Kaya Tapi Rakyatnya Miskin



Pimpinan Komite IV DPD RI bersama Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti usai menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Novita Anakotta, menyuarakan keprihatinannya mengenai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia yang tidak berbanding lurus dengan penyelesaian tantangan sosial. Dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, 14 Mei 2024, Novita juga mengkritik rendahnya capaian infrastruktur di Indonesia, termasuk layanan dasar dan kualitas infrastruktur umum.

Rapat tersebut bertujuan untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Rancangan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang solid di kuartal pertama tahun 2024, beberapa daerah seperti Papua mengalami disparitas dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Senator dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Sukisman Azmi, menyoroti tingkat kemiskinan yang tinggi di Papua meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Sukisman mempertanyakan

“
Papua memperoleh dana Otsus yang besar, tapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita berharap BPS sebagai lembaga independen mampu berperan menyelesaikan persoalan ini berdasarkan data-data yang menjadi kewenangannya.”

Made Mangku Pastika



Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta bersama sejawatnya Elviana dan Fernando Sinaga saat memimpin rapat kerja dengan BPS. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

mengapa dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat kemiskinan di daerah tersebut tetap tinggi.

Senator dari Bali Made Mangku Pastika, menyuarakan kekhawatiran serupa mengenai anomali di daerah kaya sumber daya tetapi masyarakatnya miskin. Pastika meminta BPS untuk menggunakan data yang independen untuk menyelesaikan masalah ini, terutama di Papua yang telah menerima dana otonomi khusus yang besar.

Sanusi Rahaningmas, Senator dari Papua Barat mengungkapkan keheranannya terhadap tingkat kemiskinan yang tinggi di Papua, meskipun provinsi tersebut memi-

liki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar, serta tambahan dana desa dan dana lainnya.

Senator dari Maluku Utara Iqbal HI Djavid, serta Senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Afnan Hadikusumo, mendorong BPS untuk memperbaiki standar pengumpulan dan pelaporan data kependudukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi perdebatan dan memastikan pemerintah memiliki pegangan data yang konsisten dan akurat.

Amalia Adininggar Widyasanti dari BPS menegaskan bahwa secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen secara

year-on-year di kuartal pertama 2024, dengan kawasan timur Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan kawasan barat. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh industri pertambangan, logam, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Namun, Amalia juga mencatat bahwa meskipun terjadi penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara nasional, disparitas antarwilayah masih tinggi. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua dengan 26,03 persen, sedangkan Bali memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 4,25 persen. (*)



Cegah Kecurangan Pemilu Perlu UU Anti Politik Uang

Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni menyerahkan laporan hasil resesnya kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dalam melakukan resesnya pada masa sidang sebelumnya di daerah pemilihan masing-masing, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 dan tahapan persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dari hasil reses tersebut, Komite I menyimpulkan perlunya UU Anti Money Politic atau Anti Politik Uang dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada.

“Untuk mewujudkan pemilu yang bersih, perlu adanya UU Anti Money Politic,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni, pada Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Selain pembentukan UU Anti Money Politic, Komite I DPD RI juga mengusulkan penguatan kewenangan Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) agar mampu melakukan pencegahan terhadap kecurangan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam berbagai bentuk.

Dengan nada yang sama, Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma, juga menekankan perlunya penguatan terhadap Bawaslu. Selain itu, anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua Barat itu, mengapresiasi hasil pelaksanaan pemilu di daerah pemilihannya yang berlangsung aman, tertib, dan damai.

“Meski masih banyak perbaikan, tapi saya apresiasi pelaksanaan pemilu di Papua. Saya berharap orang Papua yang terpilih dapat turut serta dalam segala aspek pembangunan di Indonesia,” ucapnya dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersama Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, dan Sultan B Najamudin.

Pada sidang paripurna tersebut, anggota DPD RI lainnya juga melaporkan hasil resesnya. Seperti anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Muhammad Rakhman, menyoroti bahwa lembaga pemasyarakatan yang ada di daerah pemilihannya perlu segera direhabilitasi karena sudah tidak layak dan melebihi kapasitas yang ada. “Saya melihat hal ini terjadi di hampir semua lembaga pemasyarakatan kita, sehingga perlu adanya rehabilitasi dan penataan ulang dari pemerintah,” pungkasnya.

Anggota Komite IV DPD RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara, Maya Rumantir, menyoroti alokasi transfer keuangan daerah (TKD) dan dana desa. Dia mengharapkan TKD dapat menjadi instrumen yang bertujuan untuk mendukung perjalanan pemerintah daerah (pemda), dan mendukung pencapaian bersama dan target prioritas. (*)



Sekjen DPD RI Rahman Hadi bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa pada acara serimonial peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPD RI Jawa Timur. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Gunakan Dana Hibah DPD RI Bangun Kantor di Jatim



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, bersama sejumlah senator, serta Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa secara seremonial meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memulai pembangunan kantor perwakilan baru di Surabaya, Jawa Timur. Seremoni peletakan batu pertama dihadiri oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, beberapa anggota DPD RI, dan Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa pada Senin, 13 Mei 2024.

Lokasi kantor baru tersebut berada di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya, menempati lahan seluas 2.000 meter persegi. Lahan ini merupakan hibah dari Pemerintah

kerja untuk anggota DPD RI dari Jawa Timur, satu ruang kepala kantor, dua ruang sekretariat, satu ruang serbaguna, mushola, ruang rapat, pantry, dan kamar mandi.

Proses pembangunan diharapkan akan selesai dalam waktu enam bulan. Sekretariat Jenderal DPD RI akan berperan aktif dalam pengawasan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan rasa bangganya karena Ketua DPD RI merupakan wakil dari Jawa Timur.



Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 020/1371/203.5/2021 dan Nomor PL. 02.04/03/DPDRI/II/2021, yang ditandatangani pada 24 Februari 2024.

Biaya pembangunan kantor ini diperkirakan mencapai Rp16 miliar, dana yang juga berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan NHPD Nomor 000.432/1657/2094/2024. Sekjen DPD RI Rahman Hadi, menyatakan bahwa dana hibah sebesar Rp 16.277.000.000 telah dialokasikan untuk pembangunan gedung ini.

Rahman Hadi menjelaskan lebih lanjut bahwa gedung dua lantai yang akan dibangun ini akan meliputi enam ruang

Beliau berharap pembangunan kantor ini akan mendukung Jawa Timur sebagai pusat gravitasi baru di Indonesia. “Harapan dari proses *ground breaking* ini adalah pada bulan September kita dapat hadir kembali untuk peletakan genteng terakhir,” ujarnya.

Sehari sebelum seremoni, Sekjen DPD RI, Rahman Hadi, bersama Deputi Bidang Administrasi, Lalu Niqman Zahir, dan Deputi Bidang Persidangan, Oni Choiruddin, telah berkunjung ke lokasi untuk memantau persiapan acara peletakan batu pertama. (*)



Sekjen DPD RI Rahman Hadi sedang memasang tanda pengenal kepada salah seorang PPPK Setjen DPD RI yang mengikuti pelatihan dasar di Diklat di Rindam Jaya, Gunung Bunder, Bogor. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Sekjen DPD RI Lepas 96 PPPK Ikuti Diklat ke Rindam Jaya



Para PPPK DPD RI yang dilepas oleh Sekjen DPD RI Rahman Hadi untuk mengikuti pelatihan dasar. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Rahman Hadi, melepas 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Setjen DPD RI untuk mengikuti Pendidikan Latihan Dasar di Rindam Jaya Gunung Bunder, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Rahman Hadi berpesan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Maka pada hari ini, kami melepas 96 orang PPPK hasil seleksi tahun 2023 untuk mengikuti pendidikan latihan dasar ke Rindam Jaya. Tujuannya agar menjadi ASN yang memiliki karakter BerAkhhlak, ber-

jiwa patriot, dan memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk mengabdikan diri di DPD RI. Ikutilah latihan dengan sungguh-sungguh,” pesan Rahman Hadi, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/5/2024).

Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir, mengharapkan agar seluruh 96 PPPK Setjen DPD

RI, Fitriani, menjelaskan, pelatihan bagi PPPK Setjen DPD RI yang didesain bekerja sama dengan Rindam Jaya. Berlangsung selama lima hari mulai tanggal 6 sampai 10 Mei 2024 di Gunung Bunder, Bogor, dengan tujuan agar mendapatkan ASN dengan *Core Value BerAkhhlak*.

“Sebagai *supporting system* kepada yang terhormat Anggota DPD RI, dituntut setiap pegawai memiliki jiwa melayani yang baik. Karena itu perlu pelatihan untuk menanamkan jiwa karakter *Core Value BerAkhhlak* tersebut,” tutur Fitriani.

Komandan Resimen Induk Kodam Jaya, Kolonel Inf. Suwondo, menjelaskan bahwa selama pelatihan, pihaknya akan memberikan pelatihan dasar sesuai sistem yang sudah ada di Rindam Jaya dengan tujuan untuk membentuk karakter dasar *Core Value BerAkhhlak* bagi seluruh peserta. “Kami dari Rindam siap memberikan pelatihan dan menanamkan *Core Value ASN BerAkhhlak* kepada semua peserta,” kata Kolonel Inf. Suwondo. (*)



Ilustrasi Ist

Karo PHM Terima Delegasi DPRD Klaten

Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyu Darma, menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi kedaerahan antara DPD RI dan DPRD Kabupaten Klaten.

Didampingi oleh Kabag Humas dan Fasilitasi Pengaduan Taufik Jatmiko, Mahyu menjelaskan bahwa salah satu kewenangan DPD RI adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.

“DPD RI juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang (UU) mengenai otonomi daerah, mengharmonisasi antara pusat dengan daerah agar tidak berbenturan. Selain itu, DPD RI berwenang dalam melakukan pemantauan perda terkait pajak dan retribusi daerah,” katanya ketika menerima DPRD Klaten tersebut, di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Mahyu Darma mengharapkan bahwa dengan adanya pertemuan tersebut dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara DPD RI di pusat dengan DPRD Klaten di daerah sehingga kebutuhan dan berbagai permasalahan daerah yang memerlukan bantuan pu-



Kepala Biro PHM Setjen DPD RI Mahyu Darma ketika menerima DPRD Klaten. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Kabag Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Biro PHM Taufik Jatmiko menerima cendera mata dari DPRD Kabupaten Klaten. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sat dapat cepat tersampaikan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan Pusat terkait berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Klaten namun jawaban dari pusat cukup lambat dan terkesan seperti bola ping-

pong.

“Kami sebagai pihak yang berwenang menampung aspirasi masyarakat Klaten meminta agar dapat dibantu penyampaian permasalahan daerah kami di tingkat DPRD kepada anggota DPD RI, khususnya perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, agar permasalahan terkait pembangunan jalan lintas provinsi dapat segera teratasi,” katanya. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin memasuki Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, untuk mengikuti Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (7/4/2024).



Sejumlah senator menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD RI Jawa Timur pada tanggal 13 Mei 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Sejumlah 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Setjen DPD RI yang akan mengikuti Pendidikan Latihan Dasar, di Diklat Rindam Jaya, Gunung Bunder, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka dilepas oleh Sekjen DPD RI Rahman Hadi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pentingnya Pengawasan Aktif DPD RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Oleh:
Hasan Basri

Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Indonesia mendapatkan kuota terbesar sepanjang sejarah dengan total 241.000 jamaah haji. Peningkatan jumlah ini menandakan sebuah kepercayaan yang besar dari pemerintah Arab Saudi, namun sekaligus juga sebuah tantangan besar bagi pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan haji dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai syariat Islam.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang memiliki tugas penting dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun selama proses haji berlangsung di Arab Saudi.

Pengawasan oleh DPD RI sangat krusial mengingat kompleksitas penyelenggaraan haji yang melibatkan banyak aspek, mulai dari persiapan keberangkatan, manajemen akomodasi, katering, transportasi, hingga layanan kesehatan. Pengawasan yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan haji berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Salah satu fokus pengawasan DPD RI adalah pada aspek keamanan dan kenyamanan jamaah. Tahun ini, pemerintah mengambil inisiatif dengan tema “ramah lansia”, yang sangat penting mengingat 21% dari total jamaah adalah lansia. Pe-

nerapan program *One Stop Services* yang diharapkan dapat mempercepat semua proses keberangkatan adalah langkah positif yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk memudahkan proses haji bagi jamaahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya serius untuk mengakomodir kebutuhan spesifik jamaah, termasuk mereka yang membutuhkan perhatian lebih.

Namun, ada isu penting yang masih perlu ditangani lebih lanjut, seperti lamanya waktu tunggu haji yang menjadi kekhawatiran bersama. Menurut DPD RI, hal ini tidak hanya menyangkut pengalaman spiritual jamaah, tetapi juga efisiensi dan transparansi





Foto Ilustrasi Ist

dalam pengelolaan keuangan haji. Persoalan ini menjadi kritik utama yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga terkait yang mengelola dana haji.

Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pengelolaan keuangan haji, khususnya melalui revisi UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. DPD RI melalui Komite III mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera merealisasikan rencana dan peluang investasi dana haji di Arab Saudi yang dapat memberikan manfaat lebih besar untuk jamaah.

Pengawasan yang dilaku-

kan DPD RI tidak hanya penting dalam konteks penyelenggaraan haji tahun ini, tetapi juga dalam membangun sebuah sistem haji yang lebih baik untuk tahun-tahun mendatang. Masukan dari DPD RI yang diterima dari aspirasi masyarakat dan daerah menjadi titik tolak untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam sistem haji Indonesia.

Pada akhirnya, peran serta aktif DPD RI dalam mengawasi penyelenggaraan haji sangatlah vital. Dengan adanya kuota terbesar sepanjang sejarah, Indonesia harus memastikan bahwa semua jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan lancar dan memperoleh manfaat

spiritual maksimal. Upaya ini bukan hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan religius negara untuk menjamin kesejahteraan jamaah haji Indonesia.

Kedepannya, dengan adanya peningkatan kapasitas dan pengawasan yang lebih baik, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji bisa terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga mampu memberikan pengalaman yang berkesan dan meningkatkan kualitas spiritual bagi setiap jamaah haji Indonesia.

*(*Penulis adalah Ketua Komite III DPD RI)*



1 Soto Banjar

Meskipun berasal dari Kalimantan Selatan, Soto Banjar juga sangat populer di Kalimantan Utara. Kuahnya yang gurih dan segar berpadu sempurna dengan daging ayam, bihun, dan ditaburi dengan irisan daun bawang dan jeruk nipis, menjadikan Soto Banjar santapan yang menggugah selera.



(Foto IndonesiaKaya.com)

Although originally from South Kalimantan, Soto Banjar is also very popular in North Kalimantan. Its savory and fresh broth perfectly combines with chicken, vermicelli noodles, and is topped with sliced green onions and lime, making Soto Banjar a mouthwatering dish.

Empat Kuliner Terenak di Kaltara

The Four Most Delicious Foods in North Kalimantan

Kalimantan Utara, wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya, juga menawarkan kuliner yang lezat dan unik. Berikut empat jenis makanan terenak dari Kalimantan Utara:

North Kalimantan, a region rich in cultural diversity, also offers delicious and unique culinary delights. Here are four of the tastiest dishes from North Kalimantan:

2 Ayam Cincane

Makanan khas suku Dayak ini terbuat dari ayam yang dibumbui dengan bumbu khas seperti kunyit, jahe, dan bawang merah, kemudian dibakar hingga aroma asapnya tercium. Rasanya yang khas dan cara pengolahannya yang unik menjadikan Ayam Cincane favorit banyak orang.



(Foto PoultryIndonesia.Com)

This traditional dish from the Dayak tribe is made from chicken seasoned with spices such as turmeric, ginger, and red onion, then grilled until it emits a smoky aroma. Its distinctive flavor and unique preparation make Ayam Cincane a favorite among many.

3 Bubur Pedas

Bubur ini unik karena menggunakan bumbu rempah-rempah yang kaya, seperti lengkuas dan serai, serta dicampur dengan sayuran seperti kangkung dan labu. Bubur Pedas biasanya disantap sebagai sarapan dan sangat cocok dinikmati saat cuaca dingin.



(Foto HelloIndonesia.com)

This porridge is unique for its use of rich spices like galangal and lemongrass, mixed with vegetables such as water spinach and squash. Bubur Pedas is usually eaten for breakfast and is particularly enjoyable during cold weather.

4 Mandai

Olahan kulit buah cempedak yang difermentasi ini merupakan camilan khas Kalimantan Utara. Mandai bisa diolah menjadi berbagai hidangan, baik itu digoreng krispi atau dijadikan bahan tambahan dalam masakan, seperti sambal. Rasa uniknya menjadikan Mandai camilan yang menarik untuk dicoba.



(Foto OSC Medcom)

This snack made from fermented cempedak fruit rind is a specialty of North Kalimantan. Mandai can be prepared in various dishes, whether fried crispy or used as an ingredient in other dishes like sambal. Its unique taste makes Mandai an interesting snack to try.



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**
Mengucapkan

Selamat Hari
Kebangkitan Nasional

20 Mei 2024



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

